

BAB V **PENUTUP**

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk Kesehatan, yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2019 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Selubungan dengan itu terbitnya Permendagri 54 Tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Di dalam Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, dan adanya evaluasi terhadap SAKIP SKPD.

- b. Di dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan tahun 2019 masih belum sempurna, terkait dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pemahaman tentang aturan tata cara penyusunan masih berbeda-beda.
- c. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Kalimantan Selatan maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Barito Kuala dan Renstra SKPD).

5.3. Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu meningkatkan kapasitas SDM aparatur Dinas Kesehatan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
- b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
- c. Menerapkan system *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.

- d. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Marabahan, Juni 2018
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Barito Kuala,

H. Sugian Nor, SKM, M.kes
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip.19590501 198103 1 018

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

0	0	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten	Jumlah lampu dan alat listrik lainya yang dibeli untuk dinas, Puskesmas dan gudang farmasi	9 jenis	33,665,750	Pendapatan Daerah	0 jenis	0
0	0	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah bahan bacaan bagi dinas,	24 bh	4,820,000	Pendapatan Daerah	0 bh	0
0	0	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	SKPD	Jumlah makanan dan minuman harian, rapat dan tamu dan kegiatan	22.072 porsi	80,220,000	Pendapatan Daerah	0 porsi	0
0	0	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kabupaten	Jumlah rapat koordinasi, pertemuan dan konsultasi	131 ok	96,950,000	Pendapatan Daerah	0 ok	0
0	0	1	20	Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam daerah	Kabupaten	Jumlah rapat koordinasi, pertemuan dan konsultasi	647 oh	68,942,000	Pendapatan Daerah	0 oh	0
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
0	0	2	10	Pengadaann Mebeleur	SKPD			107,850,000	Pendapatan Daerah		0

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

2019

0	0	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten	"Terlaksananya pemeliharaan kantor dinas kesehatan, dan gudang farmasi."	21 Instansi	373,258,500	Pendapatan Daerah	0 Instansi	0
0	0	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten	Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 dinkes, gudang farmasi dan Puskesmas yang dipelihara	137 bh	320,580,100	Pendapatan Daerah	0 bh	0
0	0	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kabupaten	Jumlah AC, Genset, Kulkas Dinas, Puskesmas dan Gudang Farmasi yang dipelihara	56 bh	57,295,000	Pendapatan Daerah	0 bh	0
0	0	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten	Jumlah peralatan rutin/berkala gedung kantor (komputer, laptop, printer dan mesin tik) yang dipelihara	54 bh	137,972,800	Pendapatan Daerah	0 bh	0
0	0	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							